

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Deskripsi Umum Kota Malang

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Surabaya dan merupakan kota terbesar di kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk. Selain itu, Malang juga merupakan kota terbesar kedua di wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung.

Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Luas wilayah kota Malang adalah 252,10 km². Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang). Wilayah Malang Raya yang berpenduduk sekitar 4 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur setelah Gerbang Kertosusila.

Kawasan Malang Raya dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Malang dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendidikan terkemuka di Indonesia karena banyak universitas dan politeknik negeri maupun swasta yang terkenal hingga seluruh Indonesia dan menjadi salah satu tujuan pendidikan berada di kota ini, beberapa di antaranya yang paling terkenal adalah Universitas Brawijaya, Universitas

Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang.

3.1.1 Administratif

Kota Malang merupakan wilayah di Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan dan 57 desa. Mencakup luas wilayah 110,06 km² dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Klojen dengan luas 8,83 km², terbagi menjadi 89 RW dan 674 RT.
- b. Kecamatan Kedungkandang dengan luas 39,89 km², terbagi menjadi 110 RW dan 82 RT.
- c. Kecamatan Blimbing dengan luas 17,77 km², terbagi menjadi 123 RW dan 880 RT.
- d. Kecamatan Sukun dengan luas 20,97 km²; terbagi menjadi 86 RW dan 820 RT; dan
- e. Kecamatan Lowokwaru dengan luas 22,60 km² terbagi menjadi 118 RW dan 739 RT.

Batasan wilayah administratif dari Kota Malang adalah di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

3.1.2 Geografis dan Topografis

Letak kota Malang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dan secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
- b) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
- c) Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

3.2 Deskripsi Umum Kecamatan Klojen

Kecamatan Klojen merupakan kecamatan yang terletak di pusat wilayah Kota Malang. Klojen merupakan satu dari tiga wilayah kecamatan tertua di Kota Malang sejak ditetapkan sebagai Kotapraja di masa pendudukan Belanda. Nama Kloen diambil dari kata Loji, yang merupakan benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Claket.

Secara administratif, Kecamatan Klojen dikelilingi oleh empat kecamatan lainnya yang ada di Kota Malang. Di sebelah utara, Kecamatan Klojen berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru dan

Kecamatan Blimbing. Sedangkan di sebelah timur, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedungkandang. Di sebelah selatan, Kecamatan Klojen berbatasan dengan Kecamatan Sukun, di sebelah barat, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru.

Untuk mengurus administrasi kependudukan, warga setempat bisa datang ke Kantor Kecamatan Klojen Kota Malang yang beralamatkan di Jalan Surabaya, Klojen, Kota Malang. Kecamatan Klojen memiliki luas area 8,83 km². Saat ini, Kecamatan Klojen memiliki total 11 kelurahan. Mulai dari Kelurahan Klojen, Kelurahan Rampal Celaket, Kelurahan Oro – Oro Dowo, Kelurahan Samaan, Kelurahan Penangungan, Kelurahan Gading Kasri, Kelurahan Bareng, Kelurahan Kasin, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kiduldalem.

Kecamatan Klojen memiliki beberapa lembaga kemasyarakatan yang dibawah. Mulai dari PKK, LPMK, BKM, Karang Werda, Karang Taruna, Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat, hingga Forum Anak. Selain itu, pihak kecamatan ini juga mewadahi puluhan UKM (Usaha Kecil Menengah).

Sebagai Kota pendidikan, sekolah – sekolah tersebar di berbagai wilayah di Kota Malang, tak terkecuali di daerah Kecamatan Klojen. Di kecamatan ini terdapat banyak sekolah mulai jenjang dasar, menengah pertama, hingga menengah atas dan kejuruan. Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Negeri di kecamatan ini antara lain MAN 3, SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, dan SMA Negeri 5.

Sementara sekolah swasta terkenal lainnya adalah SMA Islam, SMA Katolik Santo Albertus (Dempo), SMA Katolik Cor Jesu, SMA Katolik Frateran, SMA Katolik Santa Maria, SMA Kristen Kalam Kudus, SMA Kristen Petra, SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang, dan SMA Taman Harapan. Sementara untuk SMP dan MTs unggulan, ada nama MtsNegeri 01, SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMP Negeri 5, SMP Negeri 6, SMP Negeri 8, SMP Negeri 9, SMP Negeri 19, SMP Katolik Kolese Santo Yusup 01. Sedangkan sekolah kejuruan antara lain SMK Negeri 03, SMK Negeri 04, dan SMK Nasional.

Adapun visi dan misi dari Kecamatan Klojen yaitu, dengan visi terwujudnya pelayanan publik yang adil, profesional dan akuntabel. Dengan misi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Adapun sasaran dan target Kecamatan Klojen yaitu sebagai berikut: tujuan program pembangunan pada pemerintah Kecamatan Klojen adalah terciptanya stabilitas ketentraman dan keterlibatan wilayah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan yang didukung oleh kualitas aparatur yang profesional, tanggap atas semua permasalahan yang timbul di masyarakat, serta bertanggung jawab atas semua yang telah dilaksanakan. Adapun sasaran dari pemerintah Kecamatan Klojen:

- a. Tercapainya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama dan nilai sosial budaya dalam masyarakat;
- b. Terselenggaranya kualitas pelayanan prima dengan perbaikan secara berkesinambungan;

- c. Tercapainya kemampuan golongan ekonomi lemah dalam menghadapi krisis ekonomi dan arus globalisasi;
- d. Terjadinya peningkatan kualitas budaya tertib hukum pada masyarakat;
- e. Tercapainya optimalisasi penerimaan daerah dari sumber – sumber pendapatan asli daerah pada sektor pajak;
- f. Tercapainya kualitas lingkungan yang menganut konsep sanitasi lingkungan.

3.3 Deskripsi Umum Kelurahan Bareng

Kelurahan Bareng dengan luas wilayah 10,650 km² dengan ketinggian dari permukaan laut 4,44 mdpl, suhu maksimum/ minimum 30°C – 18°C, curah hujan 44 mm/ tahun dengan topografi bentuk wilayah datar sampai berombak.

Secara administratif Kelurahan Bareng dikelilingi oleh empat kelurahan. Di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Gading Kasri, di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjungrejo, di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun.

Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Klojen terdiri dari 11 Kelurahan termasuk Kelurahan Bareng, Adapun Kelurahan Bareng terdiri dari :

- a. Kondisi Lingkungan, RT, RW dan PNS

Jumlah RT : 74 RT

Jumlah RW : 8 RW

Jumlah PNS Kelurahan : 10 orang

b. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok dan Jenis Kelamin

No.	Kelompok Umur	Penduduk			Kegunaan Data
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	< 1 th	12	10	22	Mengetahui persebaran penduduk dan angka ketergantungan.
2.	1-4 th	86	82	168	
3.	5-6 th	31	50	81	
4.	7-14 th	153	177	330	
5.	15-24 th	255	211	466	
6.	25-49 th	568	585	1153	
7.	50-65 th	291	334	625	
8.	> 65 th	103	150	253	
	Jumlah	1499	1599	3098	

Sumber data : Pendataan Kampung KB oleh Ketua RT sewilayah RW 08

Berdasarkan tabel tersebut menyatakan bahwa jumlah penduduk di wilayah RW 8 sebanyak 3.098 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sebesar 1.499 jiwa atau 48,38% dari jumlah penduduk yang ada, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.599 atau sebesar 51,61% dari jumlah penduduk di wilayah RW 8, sehingga dapat disimpulkan proporsi jumlah penduduk perempuan di wilayah RW 8 lebih banyak daripada jumlah penduduk laki – laki.

c. Jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Memiliki Akte Kelahiran

No.	Kelompok Umur	Jumlah	Kepemilikan Akta		Kegunaan Data	Intervensi	Out-put
			Jumlah	%			
1.	< 1 th	22	20	90,90	Mendaftar sekolah, melamar pekerjaan, membuat paspor	Koordinasi dengan Lurah, Camat, Dispendukcapil/ Pengadilan Negeri untuk mendapatkan akte kelahiran bagi yang belum memiliki.	Akte Kelahiran
2.	1-4 th	168	138	82,14			
3.	5-6 th	81	72	88,8			
4.	7-14 th	330	295	89,39			
5.	15-24 th	466	373	80,04			
6.	25-49 th	1153	588	50,55			
7.	50-65 th	625	94	15,04			
8.	> 65 th	253	19	7,50			
	Jumlah	3098	1599	74,54			

Sumber data: Pendataan Kampung KB oleh Ketua RT se Wil RW 08

Berdasarkan tabel tersebut menyatakan bahwa jumlah penduduk di wilayah RW 8 yang memiliki akte kelahiran sebanyak 1.599 jiwa atau 51,61% dari jumlah penduduk yang ada. Untuk kelompok umur usia sekolah dan usia produktif tingkat kepemilikan akte sudah cukup tinggi yaitu >50%, pada kelompok umur 50-65 tahun sebanyak 15,04% dan pada kelompok umur >65 tahun sebesar 7,5% . Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kepemilikan akte di wilayah RW 08 masih rendah dan didominasi pada kelompok umur 50 tahun keatas.

d. Jumlah jiwa menurut kelompok umur dan tingkat pendidikan

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Pendidikan

No	Kelompok Umur	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		Tdk Sekolah	Tdk Lulus SD/MI	SD/MI	SLTP	SLTA	PT	
1.	1 th	22	0	0	0	0	0	22
2.	1 – 4 th	168	0	0	0	0	0	168
3.	5 – 6 th	1	80	0	0	0	0	81
4.	7 – 14 th	0	0	253	77	0	0	330
5.	15 – 24 th	5	1	30	86	274	70	466
6.	25 – 49 th	1	7	102	445	375	223	1153
7.	50 – 65 th	4	8	145	60	342	66	625
8.	Diatas 65 th	7	9	61	60	104	12	253
	Jumlah	208	105	591	728	1095	371	3098

Sumber Data : Pendataan Kampung KB oleh Ketua RT se Wil RW 08

Berdasarkan tabel tersebut menyatakan bahwa penduduk di wilayah RW 8 paling banyak lulus SLTA, yaitu sebesar 1.096 atau 35,34%, lulus SLTP yaitu sebesar 728 atau dari jumlah yang ada, kemudian yang paling sedikit adalah jumlah penduduk yang tidak lulus SD sebesar 105.

Kegunaan data :

1. Mengetahui jumlah penduduk usia dibawah 24 tahun yang pendidikannya SLPT.
2. Mengetahui jumlah penduduk usia diatas 24 tahun yang tidak sekolah

Intervensi :

Koordinasi dengan Kepala Desa dan Dinas Pendidikan untuk mengusulkan paket A/B/C.

Output : penduduk bebas buta huruf/ aksara.

3.4 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terletak di Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 Malang 65137.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPAP2KB) Kota Malang merupakan perubahan dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang. BKBPM memiliki visi yaitu “terwujudnya pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk serta terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak”. BKBPM juga mempedomi strategi dan arah kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Malang yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin, meningkatkan

pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.

DP3AP2KB mempunyai bidang baru yaitu Bidang Pengendalian Penduduk serta dilakukan pemisahan yang dahulunya bernama Pemberdayaan Masyarakat menjadi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Jika dilihat dengan munculnya bidang – bidang baru namun hal tersebut masih sejalan dengan visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) sehingga dengan adanya perubahan nama tidak ada perubahan yang dalam program – program yang dilaksanakan.

DP3AP2KB diresmikan pada bulan Desember tahun 2016 berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang No. 33 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga awal tahun 2017 DP3AP2KB resmi menjalankan program – program berdasarkan tugas dan fungsi bidang masing – masing sesuai perubahan yang telah dilakukan.

Berdasarkan peraturan Wali Kota Malang Nomor 33 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasal 3 ayat 3 yaitu Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan peraturan undang – undang dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah dan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai bahan arahan operasional Dinas.

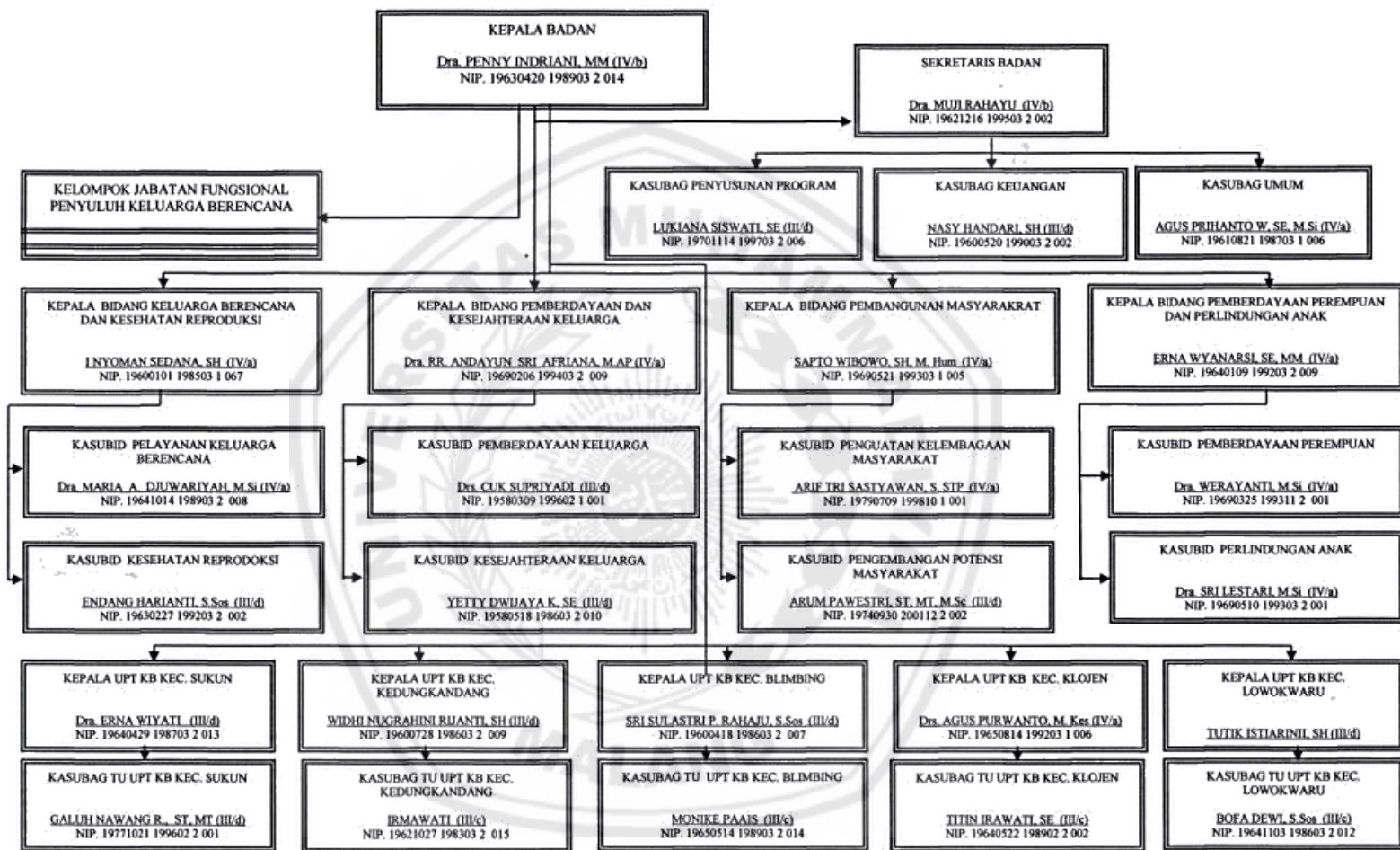
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan. Adapun fungsi pokok dari DP3AP2KB adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
3. Perumusan kebijakan teknis jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
4. Pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
5. Pelaksanaan penyaluran bantuan program pengentasan kemiskinan.
6. Pemantauan tingkat drop out peserta keluarga berencana.

7. Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman dan berkualitas.
8. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan sosial.
9. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak – hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi.
10. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA.
11. Pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan kelurahan dan kelembagaan masyarakat.
12. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, anak dan perempuan.
13. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan serta pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya, pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
14. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan.
15. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP).

17. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
18. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
20. Penyelenggaraan UPT dan Jabatan fungsional.
21. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), terdiri dari:



Sumber : dp3ap2kb.malangkota.go.id

3.5 Sejarah Kampung Keluarga Berencana (KB) Kelurahan Bareng

Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu upaya yang merupakan gagasan presiden Jokowi yang memiliki makna sebagai pembangunan nasional yang difokuskan untuk pengembangan yang berawal dari tingkat paling rendah yaitu desa atau kampung. Kampung KB juga dirancang sebagai upaya pendekatan akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) kepada keluarga kecil di desa atau kampung dalam perwujudan 8 fungsi keluarga. Kampung KB dibangun berada pada tingkat RW atau dusun dengan menggunakan pendekatan budaya masing-masing daerah.

Salah satu perwujudan Kampung KB adalah di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang. Berdasarkan penetapan dari BKKBN, Kelurahan Bareng terpilih dalam kategori yang tepat sebagai daerah yang menjadi contoh dalam pelaksanaan Kampung KB dikarenakan Kelurahan Bareng merupakan wilayah yang masuk dalam kategori kelurahan yang kesadaran warganya mengenai KB masih sangat rendah dan kelurahan ini juga masuk dalam kategori kawasan kumuh dengan angka kemiskinan sebesar 34 persen. Selain itu, Kelurahan Bareng yang terdiri dari 8 RW didominasi oleh penduduk yang belum tergabung dalam pelaksanaan program KB sehingga perlu adanya penerapan Kampung KB untuk pengendalian kelahiran jumlah penduduk.

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan Kampung KB, harus dilaksanakan pencerdasan kepada masyarakat terkait program yang ditawarkan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan

adanya sosialisasi terkait program dan manfaat program yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, harus dijalankan secara berkala sehingga program tersebut berkelanjutan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena jika program KB tersebut berjalan dengan baik, maka mampu menekan pertumbuhan penduduk.

Adapun berikut data mengenai Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen:

1. Jumlah PUS Menurut Kelompok Umur Perempuan

Tabel 3.4 Jumlah PUS Menurut Kelompok Umur Perempuan

No.	Kelompok Umur	Jumlah PUS	PUS Peserta KB	Kegunaan Data	Intervensi	Output
1.	<15 th	0	0	Mengetahui kesetiaan ber-KB menurut umur	Metode alat kontrasepsi rasional	Meningkatnya kesetiaan KB
2.	15 – 19 th	2	2			
3.	20 – 24 th	13	13			
4.	25 – 29 th	53	30			
5.	30 – 34 th	90	63			
6.	35 – 39 th	117	88			
7.	40 – 44 th	92	67			
8.	45 – 49 th	232	66			
9.	>50 th	0	0			
10.	>65 th	0	0			
		599	329			

Sumber Data : Pendataan Keluarga Tahun 2015

Berdasarkan tabel tersebut menyatakan bahwa jumlah PUS di RW 08 sebesar 599, sedangkan yang ikut KB sebesar 329, dengan demikian tingkat kesetiaan ber-KB bagi PUS di wilayah RW 08 masih rendah yaitu sebesar 54,92 persen.

2. Jumlah Unmetneed

Tabel 3.5 Jumlah Unmetneed

No.	Kelompok Umur	Jumlah PUS	PUS bukan peserta KB		Kegunaan Data	Intervensi	Output
			IAT	TIA			
1.	<15 th	0	0	0	Mengetahui jumlah PUS yang tidak ber-KB	KIE, Metode kontrasepsi, pelayanan KB, rasional	Menurunkan Unmetneed
2.	15 – 19 th	2	0	0			
3.	20 – 24 th	13	0	0			
4.	25 – 29 th	53	23	0			
5.	30 – 34 th	90	14	13			
6.	35 – 39 th	117	13	16			
7.	40 – 44 th	92	10	15			
8.	45 – 49 th	232	92	74			
9.	>50 th	0	0	0			
		599	152	118			

Sumber Data : Pendataan Kampung KB oleh Ketua RT dan Sub PPKBD se Wil RW 08

Berdasarkan tabel tersebut menyatakan bahwa jumlah PUS yang belum ikut KB/ Unmetneed masih cukup tinggi yaitu 152 atau 25,37 persen dengan alasan ingin anak ditunda dan 118 atau 19,69 persen dengan alasan tidak ingin anak lagi.

3. Keikutsertaan Ber-KB Per Mix Kontrasepsi

Tabel 3.6 Jumlah Keikutsertaan Ber-KB per Mix Kontrasepsi

No	Kontrasepsi	Jumlah	Kegunaan Data	Intervensi	Output
1.	IUD	94	Mengetahui kesertaan KB MKJP	Konseling KB MKJP, Metode Kontrasepsi MKJP, Pelayanan KB MKJP	Meningkatkan KB MKJP
2.	MOW	24			
3.	MOP	0			
4.	Implant	15			
5.	Suntik	78			
6.	Pil	52			
7.	Kondom	66			
	Jumlah	329			

Sumber Data : Pendataan Kampung KB oleh Ketua RT dan Sub PPKBD se Wil RW 08

Berdasarkan tabel tersebut menyatakan bahwa jumlah peserta KB di wilayah RW 08 sebanyak 329 atau 54,92 persen dari jumlah PUS

sebesar 599. Metode kontrasepsi yang paling banyak dinikmati adalah IUD sebesar 98 atau 29,78 persen. Sedangkan untuk peserta KB MKJP sebesar 13 atau 40,42 persen, dan pemakaian terbanyak adalah NON MKJP yaitu sebesar 59,74 persen.

Dalam mengelola Kampung KB perlu dibentuk Pokja Kampung KB yang telah disepakati bersama. Pembentukan Pokja Kampung KB dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan kualifikasi yang lain yang diinginkan di wilayah Kampung KB Kelurahan Bareng. Mengacu pada pelaksanaan 8 fungsi keluarga, berikut sistem dan struktur kepengurusan Kampung KB:

Sistem dan Struktur Kepengurusan Kampung KB

Pelindung/ Penanggung Jawab: Kepala Desa/Lurah

Penasehat : BPD, Ketua TP-PKK Desa/Kel, PPKBD/Pos KB

Ketua: Kepala Dusun / Ketua RW / Tokoh Masyarakat

Sekretaris: Sub-PPKBD/Sub-Pos KB

Bendahara: Pengurus PKK RW

Seksi – Seksi:

- a. Seksi Keagamaan
- b. Seksi Sosialisasi/ Pendidikan
- c. Seksi Reproduksi
- d. Seksi Ekonomi
- e. Seksi Perlindungan
- f. Seksi Kasih Sayang
- g. Seksi Sosial Budaya
- h. Seksi Pembinaan Lingkungan